

**PROSEDUR PENAGIHAN PIUTANG IURAN PADA BPJS
KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG HAYAM
WURUK**



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh:

Made Ayu Sonya Damayanti

NIM 2115713097

PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI BISNIS

JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS

POLITEKNIK NEGERI BALI

BADUNG

2024

**PROSEDUR PENAGIHAN PIUTANG IURAN PADA BPJS
KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG HAYAM
WURUK**



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh:

Made Ayu Sonya Damayanti

NIM 2115713097

PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI BISNIS

JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS

POLITEKNIK NEGERI BALI

BADUNG

2024

Lembar Persetujuan dan Pengesahan

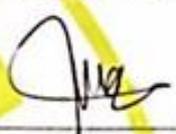
**PROSEDUR PENAGIHAN PIUTANG IURAN BPJS
KETENAGA KERJAAN KANTOR CABANG HAYAM
WURUK**

Projek Akhir ini diajukan guna memenuhi syarat untuk memperoleh Ijazah
Program Studi Administrasi Bisnis pada Jurusan Administrasi Bisnis
Politeknik Negeri Bali

(MADE AYU SONYA DAMAYANTI)
NIM 21153097

Badung, 28 Agustus 2024

Disetujui oleh,

Nama Dosen Penguji	Tanda Tangan
Ketua Dosen Penguji, Gede Sedana Wibawa Yasa, S.Tr.Akt.,M.Si NIP. 199503012024061003	
Dosen Penguji 1, Made Ayu Jayanti Prita Utami, S.S.T.Ak.,M.Si NIP. 199206132019032023	
Dosen Penguji 2, Kade Jemmy Waciko, S.Pd., M.Sc.,Ph.D. NIP. 198104122005011001	

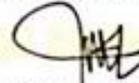
Pembimbing

Dosen Pembimbing 1



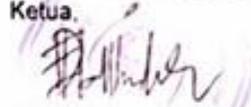
(Prof.Drs, Ida Bagus Putu Suamba, MAPH.D.)
NIP 19631231199203101

Dosen Pembimbing 2



Gede Sedana Wibawa Yasa)
NIP 199503012024061003

Disahkan oleh,
Jurusan Administrasi Bisnis
Ketua,



(Nyoman Indah Kusuma Dewi, SE., MBA., Ph.D.)
NIP 196409291990032003

Diketahui oleh,
Program Studi Administrasi Bisnis
Ketua,



(I Made Widiyantara, S.Psi.,M.Si)
NIP 197902182003121002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA PROJEK AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Made Ayu Sonya Damayanti

NIM : 2115713097

Prodi/Jurusan : D3 Administrasi Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa naskah Proyek Akhir saya dengan judul:

“PROSEDUR PENAGIHAN PIUTANG IURAN PADA BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG HAYAM WURUK”

adalah memang benar asli karya saya. Dengan ini saya juga menyatakan bahwa dalam naskah Proyek Akhir ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi, dan atau sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah Proyek Akhir ini dan disebutkan pada daftar pustaka.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan menerima sanksi akademis dalam bentuk apapun.

Badung, 5 September 2024

Yang menyatakan,



Made Ayu Sonya Damayanti

NIM 2115713097

PRAKARTA

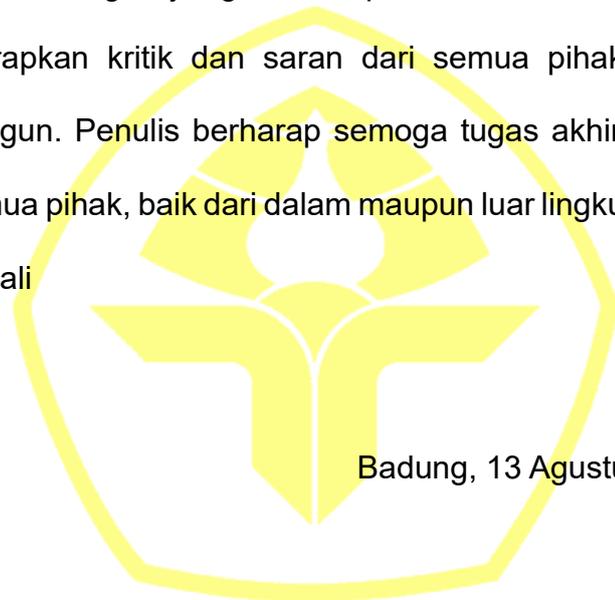
Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Dalam penulisan laporan, penulis mendapatkan bimbingan, dorongan dan semangat dari banyak pihak. Sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya laporan ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis sampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, SE., M.eCom selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang memberikan izin dan kesempatan kepada penulis mengikuti pendidikan dan memberikan fasilitas-fasilitas selama menempuh perkuliahan di Politeknik Negeri Bali.
2. Ibu Nyoman Indah Kusuma Dewi, SE., MBA., Ph.D, selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan bantuan dan kebijakan demi kelancaran penyusunan Tugas Akhir.
3. Bapak I Made Widiantra, S.Psi., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Bisnis Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan Tugas Akhir.

4. Bapak Prof. Drs. Ida Bagus Putu Suamba, MA. Ph.D. selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, pengarahan serta dukungan kepada penulis sehingga tersusunnya tugas akhir ini.
5. Bapak Gede Sedana Wibawa Yasa, S.AK., M.M selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan serta dukungan kepada penulis sehingga tersusunnya tugas akhir ini.
6. Seluruh Dosen, Staf Pengajar, dan Pegawai Politeknik Negeri Bali yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu atas didikan, ajaran, dan bantuannya selama penulis mengikuti perkuliahan di Politeknik Negeri Bali.
7. Bapak Cep Nandi Yunandar selaku Kepala Kantor Cabang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Hayam Wuruk Bali Denpasar yang telah memberikan kesempatan serta bimbingan kepada penulis untuk dapat melaksanakan kegiatan PKL (Praktek Kerja Lapangan) dan mengadakan penelitian.
8. Bapak Agus Pambudianto selaku Kepala Bidang Keuangan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Hayam Wuruk Bali Denpasar yang telah banyak memberikan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.

9. Keluarga, sahabat, dan teman – teman yang telah memberikan dorongan moral maupun material selama penyusunan tugas akhir ini.

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu dan memberikan kemudahan dalam penyusunan tugas akhir ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun. Penulis berharap semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi semua pihak, baik dari dalam maupun luar lingkungan Politeknik Negeri Bali



Badung, 13 Agustus 2024

JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
POLITEKNIK NEGERI BALI

Made Ayu Sonya Damayanti

DAFTAR ISI

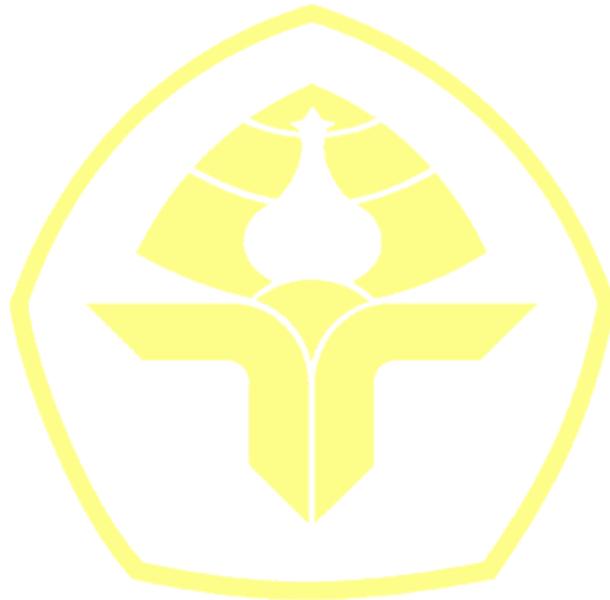
Lembar Persetujuan dan Pengesahan.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA PROJEK AKHIR.....	ii
PRAKARTA.....	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
A. Manajemen Keuangan.....	10
B. Piutang.....	14
C. Prosedur Pencatatan Piutang	18
D. Iuran	19
E. Prosedur	20

F. Ketenagakerjaan.....	22
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	26
A. Sejarah Perusahaan	26
B. Bidang Usaha	29
C. Struktur	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Kebijakan Perusahaan.....	44
B. ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA	46
BAB V PENUTUP	57
A. SIMPULAN	57
B. SARAN	60
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	64

JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Grafik Data Piutang.....	3
Gambar 3. 1 Logo BPJS	29
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi BPSJ Ketenagakerjaan Cabang Hayam Wuruk Bali Denpasar	30
Gambar 4. 1 Flowchart penagihan piutang BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Hayam Wuruk.....	52



JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
POLITEKNIK NEGERI BALI

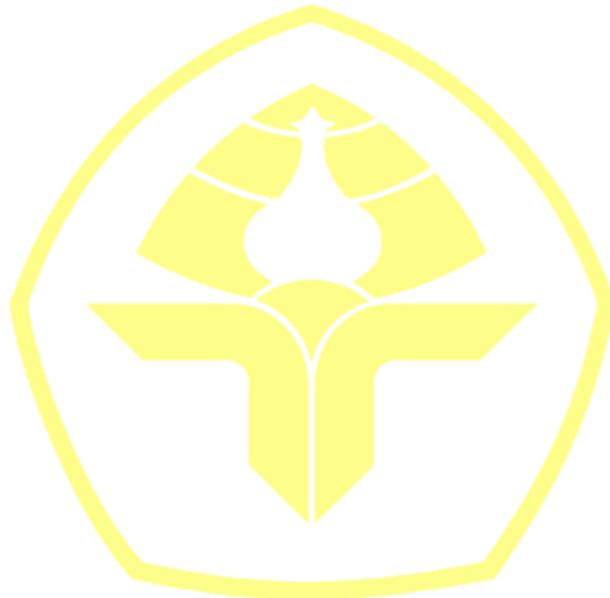
DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SURAT PENAGIHAN PIUTANG

Lampiran 2 RINCIAN PIUTANG PERUSAHAAN

Lampiran 3 Proses Bimbingan

Lampiran 4 Surat Keterangan Penyelesaian Projek Akhir



**JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
POLITEKNIK NEGERI BALI**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Menurut Badan Pusat Statistik, penduduk Indonesia berjumlah 281.603.800 jiwa, dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya jumlah penduduk Indonesia tentu akan berpengaruh terhadap jumlah pekerja.

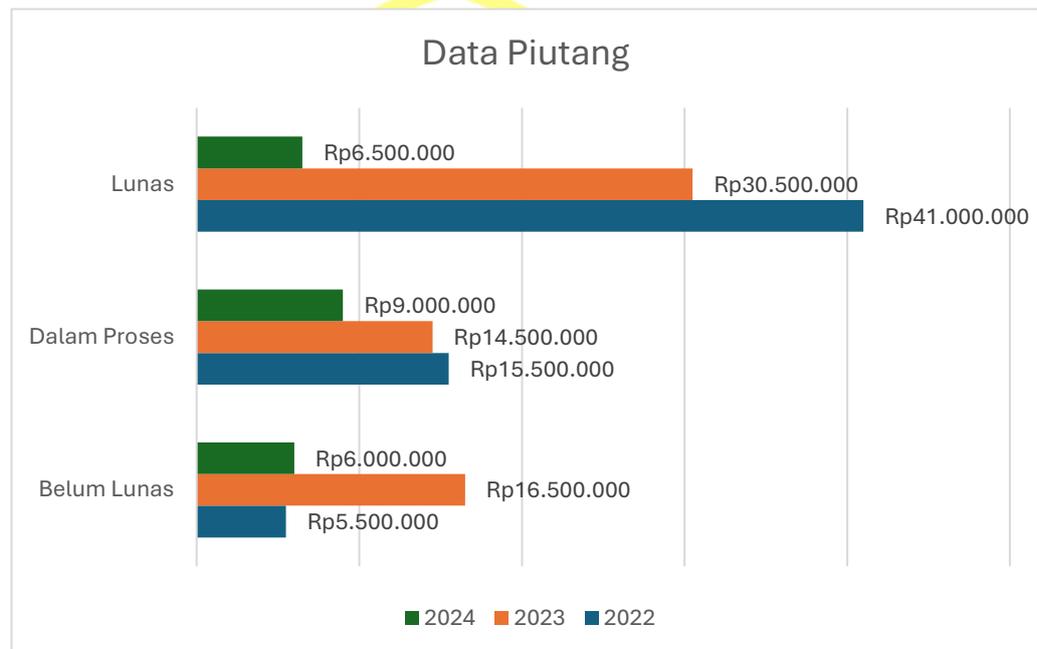
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 mengenai Sistem Jaminan Ketenagakerjaan Nasional (SKJN) memberikan landasan dan kepastian hukum tentang perlindungan dan jaminan ketenagakerjaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, negara bertanggung jawab memberikan jaminan sosial bagi pekerja untuk melindungi diri dan keluarganya. Untuk penyempurnaan Undang-Undang SKJN tahun 2004, ditetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang mengamankan PT. Jamsostek menjadi badan hukum publik, sehingga sejak tanggal 1 Januari 2014 PT. Jamsostek bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). BPJS Ketenagakerjaan merupakan suatu badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada presiden dan berfungsi untuk menyelenggarakan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja di Indonesia termasuk orang asing yang sudah bekerja di Indonesia minimal selama 6 bulan.

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 disebutkan bahwa pemberi kerja atau badan usaha wajib melindungi dan mendaftarkan dirinya serta tenaga kerjanya melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk mengikuti Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun. Agar mendapatkan haknya, pemberi kerja maupun tenaga kerja wajib membayar iuran yang menjadi kewajibannya terhadap lembaga penyelenggara program jaminan sosial. Dengan demikian maka hak untuk mendapatkan perlindungan akan terus berjalan (UU Nomor 40, 2004).

Iuran pada setiap program BPJS Ketenagakerjaan memiliki jumlah yang berbeda sesuai dengan upah dan segmentasi kepesertaan yang diikuti. Dalam setiap bulannya badan usaha wajib

membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan melalui kode iuran yang ditetapkan bagi masing-masing badan usaha. Pembayaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan jatuh tempo pada tanggal 15 setiap bulannya. Jika setelah tanggal tersebut pada bulan berikutnya perusahaan atau peserta belum membayar sebagian atau seluruh iuran, maka akan timbul piutang bagi pihak BPJS Ketenagakerjaan. Piutang tersebut dapat berdampak terhadap jaminan yang akan diterima oleh peserta (Statistik Indonesia, 2024).



POLITEKNIK NEGERI BALI

Gambar 1. 1 Grafik Data Piutang

Sumber: Data Olahan

Grafik ini memberikan ringkasan visual mengenai status penagihan piutang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Hayam Wuruk dari tahun 2022 hingga 2024. Secara umum, terlihat adanya penurunan jumlah piutang yang berhasil dilunasi dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2022, piutang lunas mencapai Rp 41 juta, namun pada tahun 2024 jumlahnya menurun menjadi hanya Rp 6,5 juta. Di sisi lain, piutang yang masih dalam proses penagihan relatif stabil di kisaran Rp 15 juta pada tahun 2022 dan 2023, dengan sedikit penurunan menjadi Rp 9 juta pada tahun 2024. Sementara itu, piutang yang belum lunas menunjukkan fluktuasi, dengan peningkatan signifikan pada tahun 2023 menjadi Rp 16,5 juta, sebelum akhirnya menurun sedikit menjadi Rp 6 juta pada tahun 2024.

Setiap harinya akan ada pendaftaran kepesertaan baru badan usaha yang mengakibatkan banyak pendataan terkait pembayaran harus dilakukan. Banyaknya badan usaha yang mendaftarkan dirinya menjadi peserta di BPJS Ketenagakerjaan membuat piutang iuran semakin bertambah. Namun hingga saat ini, masih banyak perusahaan yang menunggak pembayaran iuran mulai dari satu bulan, berbulan-bulan, hingga bertahun-tahun. Ini juga merupakan salah satu yang mempengaruhi penurunan kepesertaan. Penurunan kepesertaan merupakan suatu hal yang sangat fatal sehingga Perusahaan harus memperbaiki sistem yang digunakan. Oleh karena itu BPJS Ketenagakerjaan menerapkan prosedur penagihan piutang iuran yang ditangani langsung oleh bagian penagih yang ada di perusahaan. Penyelesaian piutang iuran dianggap berhasil ketika badan usaha yang berhutang telah menyelesaikan pembayaran

hutang iuran sepenuhnya kepada BPJS Ketenagakerjaan (Statistik Indonesia, 2024). Melihat permasalahan yang terjadi di atas mengenai adanya piutang atau tunggakan iuran pada BPJS Ketenagakerjaan, maka guna meminimalisir piutang yang ada diperlukan adanya prosedur penagihan yang tepat. Dengan demikian, penulis tertarik menulis Tugas Akhir dengan judul **“Prosedur Penagihan Piutang Iuran Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Hayam Wuruk”**

B. Pokok Masalah

1. Bagaimanakah prosedur yang diterapkan BPJS Ketenagakerjaan dalam penagihan piutang ke perusahaan yang masih memiliki tunggakan iuran?
2. Apa saja kendala yang dihadapi pada kantor BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Hayam Wuruk?
3. Bagaimana cara mengatasi kendala yang terjadi pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Hayam Wuruk?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui prosedur penagihan piutang yang diterapkan BPJS Ketenagakerjaan dalam penagihan piutang ke perusahaan yang masih memiliki tunggakan iuran
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang terjadi pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Hayam Wuruk
3. Untuk mengetahui cara mengatasi kendala yang terjadi pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Hayam Wuruk

D. Manfaat Penelitian

Jika tujuan ini dapat dicapai, maka penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian itu diharapkan mampu digunakan sebagai bahan penilaian kemampuan mahasiswa dalam memecahkan masalah nyata didalam dunia kerja serta sebagai bahan referensi untuk penelitian dengan permasalahan sejenis.

2. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam evaluasi pelaksanaan kegiatan penagihan piutang iuran pada BPJS Ketenagakerjaan.

3. Bagi mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa sehingga dapat membandingkan dan mempraktikkan ilmu yang

didapat selama menempuh pendidikan mengenai keuangan piutang.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Hayam Wuruk yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk No.143, Panjer, Denpasar.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam menyusun tugas akhir ini adalah Prosedur Penagihan Piutang Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Hayam Wuruk Denpasar.

3. Data Penelitian

a. Jenis Data Penelitian

- 1) Data Kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa keterangan-keterangan, informasi, atau uraian-uraian yang ada hubungannya dengan topik penelitian. Baik dari perusahaan maupun sumber-sumber lain. Data yang saya peroleh berupa informasi-informasi selama 6 bulan magang di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Badung.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1) Data Primer

Menurut Sugiyono (2018:456) Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

Penelitian ini dilaksanakan pada kantor BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Hayam Wuruk. Data yang saya dapatkan yaitu berupa rincian piutang Perusahaan dan surat penagihan piutang

2) Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018:456) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

c. Metode Pengumpulan Data

1) Observasi

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2020:109) observasi adalah kondisi dimana dilakukannya pengamatan secara langsung oleh peneliti agar lebih mampu memahami

konteks data dalam keseluruhan situasi sosial sehingga dapat diperoleh pandangan yang holistik (menyeluruh).

2) Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2020:114) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung melalui tanya jawab kepada I Gusti Ayu Putri Oktari selaku Penata Madya Keuangan pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Hayam Wuruk

3) Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2020:124) dokumentasi merupakan pengumpulan dari catatan peristiwa yang sudah berlaku baik berbentuk tulisan, gambar/foto atau karya-karya monumental dari seseorang/instansi.

4. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu teknik analisis yang menguraikan dan menjelaskan keterangan-keterangan yang didapatkan secara langsung dan fenomena Prosedur Penagihan Piutang Iuran Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Hayam Wuruk

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Dengan adanya prosedur yang jelas dan upaya mengatasi kendala, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Hayam Wuruk dapat menjaga stabilitas keuangan dan memastikan perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerja. Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai prosedur yang diterapkann BPJS Ketenagakerjaan dalam penagihan piutang ke Perusahaan yang masih memiliki tunggakan maka dapat disimpulkan:

1. Dalam penanganannya, prosedur ini melibatkan beberapa langkah penting, seperti komunikasi proaktif melalui surat, email, dan telepon untuk mengingatkan peserta tentang kewajiban pembayaran iuran. Selain itu, petugas penagihan melakukan pendekatan persuasif dengan menjalin hubungan baik dengan peserta, sehingga peserta merasa lebih bertanggung jawab untuk membayar iuran tepat waktu. Dengan penerapan prosedur ini, BPJS

Ketenagakerjaan Kantor Cabang Hayam Wuruk berhasil mengurangi jumlah piutang iuran yang tertunggak dan meningkatkan kepatuhan peserta dalam membayar iuran, sehingga

2. membantu menjaga stabilitas keuangan BPJS Ketenagakerjaan dan memastikan peserta mendapatkan perlindungan jaminan sosial yang seharusnya. Prosedur penagihan piutang iuran pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Hayam Wuruk dirancang untuk memastikan kelancaran pembayaran iuran oleh peserta. Prosedur ini melibatkan beberapa langkah penting, seperti komunikasi proaktif melalui surat, email, dan telepon untuk mengingatkan peserta tentang kewajiban pembayaran iuran. Selain itu, petugas penagihan melakukan pendekatan persuasif dengan menjalin hubungan baik dengan peserta, sehingga peserta merasa lebih bertanggung jawab untuk membayar iuran tepat waktu. Dengan penerapan prosedur ini, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Hayam Wuruk berhasil mengurangi jumlah piutang iuran yang tertunggak dan meningkatkan kepatuhan peserta dalam membayar iuran, sehingga membantu menjaga stabilitas keuangan BPJS

Ketenagakerjaan dan memastikan peserta mendapatkan perlindungan jaminan sosial yang seharusnya.

3. Kendala yang menjadi masalah utama dalam BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Hayam Wuruk ada pada komunikasi dengan peserta. Kendala yang sering terjadi seperti kesalahan alamat, nomor telepon yang tidak bisa dihubungi, kekeliruan dalam menghubungi PIC Perusahaan yang dimana masalah-masalah tersebut diakibatkan karena kurangnya kesadaran pihak Perusahaan dalam memperbarui informasi terkait Perusahaan baik alamat, nomor telepon ataupun perubahan PIC kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan.
4. Karena adanya berbagai kendala tersebut, maka BPJS Kantor Cabang Hayam Wuruk perlu adanya strategi untuk mengatasinya. Strategi tersebut adalah dengan mengedepankan pendekatan terhadap berbagai pihak dalam rangka memberikan layanan dan memperluas kepersetaan. Kantor berupaya terus melakukan evaluasi dan melakukan Upaya harmonisasi sebagai peraturan serta membangun koordinasi yang lebih baik dengan instansi terkait. Hal ini penting dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada pekerja.

B. SARAN

Penulis memberikan beberapa saran yang mungkin dapat membantu dalam pengembangan dari tugas akhir ini:

1. Saran untuk BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Hayam Wuruk

a. Meningkatkan kualitas data perusahaan: BPJS Ketenagakerjaan dapat mempertimbangkan untuk melakukan validasi data perusahaan secara berkala dan memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk memperbarui informasi mereka secara mandiri melalui sistem online.

b. Memperkuat koordinasi dengan pembina perusahaan: BPJS Ketenagakerjaan dapat menyelenggarakan pelatihan atau pertemuan rutin dengan pembina perusahaan untuk memastikan kelancaran komunikasi dan pemahaman yang sama terkait prosedur penagihan piutang.

c. Mengadopsi teknologi dalam proses penagihan: BPJS Ketenagakerjaan dapat mengembangkan sistem pengingat otomatis dan portal online yang memungkinkan perusahaan melihat dan mengelola tagihan mereka secara mandiri, sehingga

meningkatkan efisiensi dan transparansi proses penagihan.

2. Saran untuk peneliti berikutnya

a. Memperluas cakupan penelitian: Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan dengan membandingkan prosedur penagihan piutang di berbagai kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan atau menganalisis dampak penerapan teknologi terhadap efektivitas penagihan.

b. Menggali lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi: Penelitian selanjutnya dapat menggali lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam membayar iuran, seperti tingkat pemahaman perusahaan tentang program BPJS Ketenagakerjaan, kondisi keuangan perusahaan, atau efektivitas sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

c. Mengembangkan model prediksi: Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan model prediksi untuk mengidentifikasi perusahaan yang berpotensi mengalami kesulitan dalam membayar iuran, sehingga BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan tindakan

pencegahan dan memberikan pendampingan yang diperlukan.

Dengan mempertimbangkan saran-saran ini, diharapkan penelitian selanjutnya dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan piutang iuran BPJS Ketenagakerjaan dan memastikan perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerja.



JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyos. (2019). Manajemen Keuangan.
- Deepublish. Fred. (2022). Manajemen Keuangan. Deepublish.
- Giri. (2022). Manajemen Keuangan. Deepublish.
- Hartono. (2022). Manajemen Keuangan. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Indriyo, G., & Basri, M. (2022). Manajemen Keuangan. Deepublish.
- Kasmir. (2003). Manajemen Perbankan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2022). Manajemen Keuangan. Jakarta: Kencana. Mardiasmo. (2016). Akuntansi Perbankan. Yogyakarta: Penerbit Andi. Mulyadi. (2019). Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- Nuraida, I. (2019). Manajemen Keuangan. Deepublish.
- Statistik Indonesia. (2024). Statistik Ketenagakerjaan Indonesia. Badan Pusat Statistik.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. (2021).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. (2004).